

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONEIA PINTAR DI SMAN 1 LAMPIHONG DAN MAN 3 BALANGAN KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

Laili Noor Safitri¹, Jumaidi², Moh. Fajar Noorrahman³

Program Studi Ilmu Adminstrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: Lns553845@gmail.com

ABSTRAK

Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi berbagai masalah dalam pendidikan. Namun, terdapat beberapa fenomena yang menjadi tantangan, seperti ketidakakuratan dalam penentuan calon penerima PIP, pemanfaatan dana oleh orang tua siswa untuk kebutuhan belanja keluarga serta lambatnya proses pencairan dana. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implimentasi Program Indonesia Pintar serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 Balangan Kecamatan Lampihng Kabupaten Balangan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Indonesia Pintar di SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 Balangan belum baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang terlihat kurang baik yaitu kejelasan kebijakan, kredibilitas pesan sebagai sebuah solusi, efesiensi, partisipasi masyarakat, penerima kebijakan, kredibilitas pimpinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 Balangan di pengaruhi beberapa hal yaitu faktor pendorongnya sumber daya yang mencukupi, dan kebijakan yang berkelanjutan. Adapun faktor pengambatnya yaitu informasi yang tidak menyeluruh, kesenjangan komunikasi, Kebijakan yang belum berjalan secara efektif, minimnya partisipasi, ketidaksesuaian penerima manfaat, kredibilitas pimpinan yang kurang efektif.

Kata Kunci: Implementasi, Program Indonesia Pintar, Pendidikan, Sekolah

ABSTRACT

Permendikbud Number 10 of 2020 concerning the Indonesia Pintar Program (PIP) is an initiative launched by the central government through the Ministry of Education and Culture to address various issues in education. However, there are several phenomena that pose challenges, such as inaccuracies in determining PIP recipients, the use of funds by parents for family shopping needs, and the slow disbursement process. Based on the above, this research aims to understand the implementation of the Indonesia Pintar Program and the factors influencing it. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. This research was conducted at SMAN 1 Lampihong and MAN 3 Balangan in the Lampihng District of Balangan Regency, and the results of this study indicate that the implementation of the Indonesia Pintar program at SMAN 1 Lampihong and MAN 3 Balangan is not yet satisfactory. This can be seen in several indicators that appear to be lacking, namely policy clarity, message credibility as a solution, efficiency, community participation, policy recipients, and leadership credibility. Factors influencing the implementation of the Indonesia Pintar Program at SMAN 1 Lampihong and MAN 3 Balangan are affected by several things, namely the driving factors of adequate resources and sustainable policies. The inhibiting factors include incomplete information, communication gaps, policies that have not been effectively implemented, minimal participation, mismatch of beneficiaries, and the ineffective credibility of the leadership.

Keywords: Implementation, Program Indonesia Pintar, Education, School

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kontribusi seseorang terhadap kemajuan bangsa. Kualitas intelektual seseorang sering kali diukur dari seberapa banyak pendidikan yang telah dijalani. Melalui pendidikan, diharapkan terjadi proses transmisi ilmu pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, keterampilan dan berbagai aspek penting lainnya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. (Rostyaningsih dkk,2016)

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menangani penyelenggaraan pendidikan dan hal ini tercermin melalui salah satu peraturan yang dibuat untuk mengatur sektor tersebut. Peraturan tersebut termuat dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang disebutkan bahwa : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan, terutama bagi orang tua yang tidak mampu.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengatasi tantangan pendidikan yang dihadapi di Indonesia, terutama masalah putus sekolah di kalangan siswa usia dini akibat kesulitan finansial. Banyak siswa terpaksa menghentikan pendidikan mereka karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung, dan memilih untuk membantu keluarga dengan bekerja. Sebagai solusinya, program ini memberikan bantuan berupa uang tunai kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan, untuk membantu mereka membiayai pendidikan mereka (Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018, yang diubah dengan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020).

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Program Indonesia Pintar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak berusia 6 hingga 21 tahun, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan menengah universal atau wajib belajar 12 tahun. Selain itu, program ini berupaya mencegah potensi putus sekolah akibat kesulitan ekonomi serta menarik kembali siswa yang telah terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena kendala finansial.

SMA Negeri 1 Lampihong dan MAN 3 Balangan adalah dua sekolah negeri yang terletak di Lampihong dan keduanya telah menerima bantuan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP). Setiap sekolah menerima alokasi dana KIP secara tahunan. Bantuan ini ditujukan kepada siswa-siswi yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang mana bantuan ini dikirimkan langsung oleh pemerintah pusat. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dikeluarkan oleh pemerintah ini untuk mendorong sekolah-sekolah mengimplementasikannya dalam operasional mereka.

Berdasarkan Hasil Observasi awal fenomena masalah yang muncul dari Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar pada SLTA di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 Balangan) antara lain:

1. Data yang digunakan untuk menentukan calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) masih belum akurat. Terdapat 28 siswa yang layak menerima bantuan, terdiri dari 16 siswa di SMAN 1 Lampihong dan 12 siswa di MAN 3 Balangan, namun mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, proses seleksi calon penerima PIP juga masih perlu ditingkatkan, mengingat

masih ada siswa yang terpaksa putus sekolah akibat masalah ekonomi. Padahal, tujuan utama PIP adalah untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu.

2. Terdapat pemanfaatan dana dari orang tua siswa untuk kebutuhan berbelanja keluarga, sedangkan didalam Peraturan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2023 terkait petunjuk pelaksanaan program Indonesia pintar bahwasanya dana PIP diperuntukan untuk keperluan sekolah atau penunjang kegiatan sekolah.
3. Lambatnya pencairan dana disebabkan oleh kurangnya pendampingan dalam proses pengambilan dana PIP, yang mana siswa harus langsung mengambil dana tersebut di bank BNI yang berada di kabupaten, sedangkan di dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 pasal 12 ayat (1) bagian (b) disebutkan bahwa pengelola PIP satuan pendidikan bertugas memantau dan membantu kelancaran proses pengambilan dana PIP.

Berdasarkan fenomena yang muncul, penulis merasa tertarik untuk mengambil judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMAN 1 LAMPIHONG DAN MAN 3 BALANGAN KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN”**

Penelitian ini difokuskan pada teori Implementasi Goggin Brown (dalam Kadji, 2015:75-76), yang secara implisit mensyaratkan 3 aspek penting dalam implementasi kebijakan, yakni:

1. Isi Pesan
2. Bentuk Pesan
3. Persepsi Tentang Pimpinan

Penelitian terdahulu yang pertama oleh (Ulfah Ulfiah, 2020) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Program Studi Ilmu Administrasi Publik dengan Judul penelitian “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Kelua Kabupaten Tabalong” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijak tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Kelua, Kabupaten Tabalong telah berjalan dengan baik. Pertama, tujuan pelaksanaan Program Indonesia Pintar telah ditetapkan dengan jelas dan sesuai harapan. Kedua, sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini sudah memadai dan kompeten. Ketiga, sarana dan prasarana yang tersedia juga mendukung pelaksanaan program dengan baik. Keempat, keberadaan organisasi formal dan informal telah berjalan dengan cukup baik. Kelima, pelaksanaan Program Indonesia Pintar menunjukkan tingkat kejujuran yang tinggi. Keenam, komitmen para pelaksana terhadap program ini cukup kuat. Ketujuh, koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar telah berlangsung dengan baik. Kedelapan, kondisi ekonomi di lingkungan tersebut mendukung, sehingga mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Kesembilan, kondisi sosial juga cukup baik, dengan dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. Kesepuluh, dukungan politik terhadap Program Indonesia Pintar ini menunjukkan kondisi yang baik, yang tercermin dari perhatian pemerintah. Namun, dari banyak aspek telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa indikator yang perlu perhatian. Pertama, sasaran yang ditetapkan pada Program Indonesia Pintar masih belum sepenuhnya tepat. Kedua, terkait sumber daya keuangan, masih terdapat isu permasalahan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh orang tua siswa. Ketiga, pencairan dana sering kali terlambat dan tidak sesuai jadwal. Keempat, komunikasi dalam aktivitas pelaksana juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas program.

Kedua oleh (Ane Septiyani, 2020) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Sebelas April Sumedang dengan judul penelitian “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan, Kabupaten Sumedang, sudah berjalan dengan baik, meski belum mencapai tingkat optimal. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, antara lain ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan, kurangnya sosialisasi, minimnya koordinasi dengan pemangku kepentingan serta dinas terkait dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia, terutama pada panitia atau pegawai yang bertugas dalam program.

Tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah Kebijakan umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani isu-isu tertentu. Namun, kebijakan sejatinya lebih dari sekadar penetapan keputusan. Rose (dalam Hamdi, 2015:36) menjelaskan bahwa kebijakan adalah rangkaian panjang kegiatan yang saling terkait dan memiliki dampak bagi pihak-pihak yang berkepentingan, bukan hanya sekadar keputusan semata. Anderson (dalam Subarsono, 2012:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan yang diambil oleh lembaga dan aparat pemerintah. Namun, penting untuk diingat bahwa kebijakan publik juga dapat dipengaruhi oleh berbagai aktor dan faktor yang berasal dari luar pemerintahan. Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye, penulis buku *Understanding Publik Policy*, yang dikutip oleh Riant Nugroho D. (dalam Sobirin, 2017:9) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamas besar bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. *Browne* dan *Wildavsky* (dalam Firdianti, 2018:19) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Menurut Tahjan (dalam Karso, 2021) Secara etimologis, istilah "implementasi" merujuk pada "aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan menggunakan sarana (alat) untuk mencapai hasil. " Ketika dikaitkan dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan atau penyelesaian dari kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui, dengan memanfaatkan sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nugroho (dalam Karso, 2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah cara untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tanpa kurang dan tanpa lebih. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat dua pendekatan yang dapat diambil: pertama, langsung mengimplementasikan melalui program-program, atau kedua, melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik yang telah ada.

Program Indonesia Pintar (PIP), yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), bertujuan untuk mendukung siswa dari kalangan ekonomi lemah agar dapat mengakses pendidikan yang layak. Program ini diharapkan dapat mencegah angka putus sekolah dan memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan ini akan digunakan oleh siswa untuk biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan uang saku. Dengan adanya KIP, diharapkan tidak akan ada lagi siswa yang terpaksa putus sekolah akibat keterbatasan biaya. Bantuan ini diperuntukkan bagi peserta didik yang kurang mampu, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Burhan Bungin (2014:68) penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau fenomena sosial yang terdapat dalam masyarakat sebagai objek kajian. Metode ini berusaha untuk mengungkapkan realitas tersebut sehingga dapat dipahami sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran mengenai kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.

Data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer, yang diperoleh langsung oleh penulis dari informan, dan data sekunder, yang merupakan informasi pendukung yang dikumpulkan dari literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang relevan dengan Implementasi Program Indonesia Pintar. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 13 informan sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun setelahnya dalam jangka waktu tertentu. Selama wawancara, peneliti telah mulai menganalisis jawaban dari responden. Seperti yang diungkapkan oleh Huberman (dalam Sugiyono, 2022:132), aktivitas analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga mencapai titik jenuh. Proses analisis ini mencakup tiga aktivitas utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif, beberapa langkah dilakukan, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, analisis terhadap kasus negatif, serta member check (Sugiyono, 2022:185).

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori Implementasi Goggin Brown (dalam Kadji, 2015:75-76), yang secara implisit mengisyaratkan tiga hal penting dalam implementasi kebijakan, yaitu: Isi Pesan, Bentuk Pesan, dan Persepsi Tentang Pimpinan. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Isi Pesan

Isi pesan merupakan substansi atau konten dari kebijakan yang akan diimplementasikan, mencakup kejelasan, kredibilitas, dan konsistensi dari kebijakan tersebut.

a. Kejelasan Kebijakan

Kejelasan kebijakan merupakan tingkat kejelasan suatu kebijakan dalam hal tujuan, cara pelaksanaannya baik itu tahap ataupun jalurnya serta kejelasan aturan yang menjadi acuan dalam melaksanakannya.

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat ditarik kesimpulan bahwa kejelasan kebijakan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 Balangan belum baik karena baik dari pihak sekolah memang mengetahui akan aturan dari PIP ini, jalur atau tahapnya serta tujuan dari adanya Program Indonesia Pintar ini namun dari pihak orang tua siswa masih belum mengetahui akan kejelasan kebijakan tersebut.

b. Kredibilitas pesan sebagai solusi

Kredibilitas pesan sebagai solusi ialah dimana tingkat kepercayaan bahwa kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kredibilitas pesan sebagai sebuah solusi tentang Program Indoneia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 Balangan belum bisa dikatakan baik karena pesan terkait PIP ini sudah disampaikan kepada siswa saja dan hal ini yang masih menjadi permasalahan di mana masih terdapat siswa yang kurang mampu tetapi tidak menerima bantuan dari program ini. Selain itu ada penerima PIP yang putus sekolah di SMAN 1 Lampihong dan hanya kelas 11 dan 12 di MAN 3 Balangan yang mendapat PIP ini artinya pesan yang disampaikan akan hal ini belum menjadi sebuah solusi.

c. Konsistensi Kebijakan

Konsistensi kebijakan adalah Kesesuaian kebijakan dengan aturan dan program yang sudah dilaksanakan secara terus menerus atau terdapat perubahan di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai konsistensi kebijakan terkait Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 balangan sudah berjalan dengan baik karena sekolah selalu melaksanakan program ini meskipun menunggu dari pusat namun jika dari pusat sudah mengeluarkan pengumuman akan PIP ini kepada sekolah diwilayahnya masing-masing maka kedua sekolah ini juga selalu melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada.

2. Bentuk Pesan

Bentuk pesan ini Mengacu pada cara atau metode penyampaian kebijakan, termasuk bagaimana kebijakan dikomunikasikan dan diorganisir untuk mencapai target yang ditentukan.

a. Efisiensi Kebijakan

Efisiensi Kebijakan adalah Penggunaan sumber daya yang optimal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan waktu dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai efisiensi kebijakan dapat disimpulkan bahwa efisiensi kebijakan masih belum berjalan baik karena masih kurang tepat sasaran dan waktu pencairan yang lama serta tidak ada pendampingan dalam hal pengambilan uang ke bank BNI yang terletak di kabupaten

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat ialah Keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan dan turut mensukseskan berjalannya implementasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait partisipasi masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang hal ini sangat di sayangkan karena memang dari pihak sekolah tidak ada melakukan sosialisasi terkait hal ini padahal dalam aturan sudah jelas jika ada sosialisasi yang harus dilakukan agar masyarakat tahu akan program PIP ini supaya masyarakat yang kurang mampu dapat mengajukan anaknya menjadi penerima PIP ini dan tentunya hal ini sangat membantu untuk menunjang pendidikannya. Dari kurangnya partisipasi masyarakat ini juga menyebabkan orang tua penerima PIP ini tidak mengetahui tujuan dan manfaat adanya program ini sehingga dana yang diperuntukkan untuk pendidikan anak mereka bisa digunakan mereka untuk membeli kebutuhan lainnya diluar kebutuhan pendidikan

c. Frekwensi pengulangan pesan

Frekwensi pesan atau frekwensi pengulangan pesan adalah Frekuensi penyampaian informasi kebijakan kepada sasaran yaitu siswa di sekolah mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai frekwensi pengulangan pesan ini sudah baik karena dari pihak sekolah memang selalu memberikan arahan atau nasehat kepada siswa terkait penggunaan dana PIP ini untuk digunakan sebagaimana mestinya jika sudah pencairan nantinya.

d. Tipe Kebijakan

Tipe Kebijakan adalah Jenis dan karakteristik dari kebijakan yang diimplementasikan pada tempat tersebut yaitu sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai tipe kebijakan dapat di simpulkan bahwa tipe kebijakan pada implementasi Program Indonesia Pintar di SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 Balangan sudah baik karena memang hanya mengikuti aturan yang datangnya dari pusat.

e. Penerima Kebijakan

Penerima kebijakan merupakan Sasaran atau target group dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai penerima kebijakan masih kurang karena masih terdapat siswa yang masuk kriteria kurang mampu dan masuk kriteria dalam prioritas penerima namun karena ada sistem penyaringan maka siswa tersebut ada beberapa orang yang tidak mendapatkan dana bantuan Program Indonesia Pintar ini.

3. Persepsi tentang pimpinan

Persepsi tentang pimpinan Berkaitan dengan pandangan atau penilaian terhadap kapasitas dan kemampuan pemimpin dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan

a. Sumber Daya

Sumber Daya adalah Ketersediaan dan kecukupan sumber daya untuk implementasi baik itu sumber daya manusia ataupun dari segi fasilitas dan sarana prasarana penunjang lainnya guna memudahkan jalannya implementasi di tempat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai Sumber Daya terkait kebijakan PIP di SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 balangan dapat di simpulkan sudah baik karena baik dari sumber daya manusianya atau operator yang menangani masalah PIP ini sudah cukup berpengalaman, begitupun dengan fasilitas yang sudah memadai baik dari computer ataupun internet yang digunakan dalam pelaksanaannya.

b. Legitimasi Pimpinan daerah pembuat kebijakan

Legitimasi pimpinan daerah pembuat kebijakan merupakan Kewenangan resmi yang dimiliki pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai legitimasi pimpinan daerah pembuat kebijakan dapat di simpulkan bahwa yang membuat kebijakan rogram Indonesia Pintar ini adalah para atasan yang ada di pusat bukan di daerah tetapi tidak ada penolakan terkait hal ini masyarakat menerima saja artinya sudah baik dan masyarakat atau orang tua siswa merasa terbantu akan adanya kebijakan ini.

c. Kredibilitas Pimpinan

Kredibilitas pimpinan adalah Tingkat kepercayaan terhadap kemampuan dan integritas pimpinan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai Kredibilitas dapat di simpulkan belum baik karena kepala sekolah yang menjadi pimpinan di sekolah masing-masing memang mempercayakan program ini di sekolah mereka terkait PIP ini namun dalam pelaksanaannya masih ada anak yang putus sekolah di SMAN 1 Lampihong karena kondisi eskonominya serta

ada ketimpangan kouta untuk penerima PIP di MAN 3 Balangan yang hanya memprioritaskan kelas 11 dan 12 untuk PIP ini.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 Balangan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yaitu:

1. Faktor Penghambat

a. Informasi yang tidak Menyeluruh

Informasi yang menyeluruh merupakan hal yang penting karena dapat memberikan pemahaman yang lengkap kepada penerima pesan sehingga dapat menciptakan tercapainya tujuan dengan baik sesuai dengan aturan yang mengatur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terdapat informasi yang masih belum menyeluruh mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 Balangan karena dari pihak sekolah memang mengetahui akan aturan dari PIP ini, jalur atau tahapnya serta tujuan dari adanya Program Indonesia Pintar ini namun dari pihak orang tua siswa masih belum mengetahui aturannya, pelaksanaan atau jalur dan tahapnya pun hanya sebagian kecil dan tujuannya juga masih belum diketahui secara jelas. Hal ini sangat disayangkan karena tidak jarang dana PIP ini digunakan untuk belanja kebutuhan keluarga seperti kebutuhan pokok keluarga mereka akibat dari kurangnya informasi yang menyeluruh mengenai PIP ini.

b. Kesenjangan Komunikasi

Komunikasi yang efektif menjadi kunci utama agar informasi yang disampaikan dapat menjadi sebuah solusi dalam suatu permasalahan sehingga pengimplementasian suatu kebijakan juga menjadi mudah.

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa adanya kesenjangan komunikasi sehingga menyebabkan kredibilitas pesan yang disampaikan belum menjadi solusi karena kenyataan di lapangan menunjukkan masih terdapat siswa yang kurang mampu namun belum mendapatkan bantuan PIP ini, padahal pihak sekolah bisa menghimbau atau memberikan arahan supaya mengurus berkas PIP ini agar nantinya bisa di ajukan dan ada anak yang mendapat bantuan PIP ini tetapi malah putus sekolah padahal tujuan dari adanya PIP ini adalah untuk membantu kebutuhan pendidikan peerta didik dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, dan ada juga peruntukkan hanya kelas 11 dan 12 yang mendapat PIP ini untuk kelas 10 tidak ada, artinya masih terdapat permasalahan akan hal tersebut dan harus di atasi dan artinya pesan yang disampaikan masih belum bisa menjadi sebuah solusi.

c. Kebijakan yang belum berjalan secara efektif

Kebijakan hendaklah berjalan secara efektif agar pelaksanaan dan waktu berjalannya kebijakan tersebut dapat terimplementasikan dengan baik sehingga sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi dapat ditarik kesimpulan bahwa efisiensi kebijakan masih belum berjalan baik karena masih kurang tepat sasaran dan waktu pencairan yang lama serta tidak ada pendampingan dalam hal pengambilan uang ke bank BNI yang terletak di kabupaten.

d. Minimnya Partisipasi

Kurangnya sosialisasi dan transparansi mengenai informasi kebijakan dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam sebuah kebijakan yang akan di implementasikan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi masih terdapat minimnya partisipasi masyarakat hal ini sangat di sayangkan karena memang dari pihak sekolah tidak ada melakukan sosialisasi terkait hal ini padahal adanya aspek transparansi dalam aturan tersebut agar masyarakat tahu akan program PIP ini supaya masyarakat yang kurang mampu dapat mengajukan anaknya menjadi penerima PIP ini dan tentunya hal ini sangat membantu untuk menunjang pendidikannya, karena kurangnya partisipasi masyarakat ini juga menyebabkan orang tua penerima PIP ini tidak mengetahui tujuan dan manfaat adanya program ini sehingga dana yang diperuntukkan untuk pendidikan anak mereka bisa digunakan mereka untuk membeli kebutuhan lainnya diluar kebutuhan pendidikan.

e. Ketidaksesuaian penerima manfaat

Penerima manfaat dari sebuah kebijakan haruslah tepat sasaran agar program tersebut dapat berjalan secara efektif dan dapat memberikan dampak yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai penerima manfaat kebijakan masih kurang sesuai karena masih terdapat siswa yang masuk kriteria kurang mampu dan masuk kriteria dalam prioritas penerima namun karena ada sistem penyaringan maka siswa tersebut ada beberapa orang yang tidak mendapatkan dana bantuan Program Indonesia Pintar ini.

f. Kredibilitas Pimpinan yang kurang efektif

Kredibilitas seorang pimpinan adalah landasan utama keberhasilan suatu kebijakan. Kepercayaan masyarakat dan anak buahnya terhadap pemimpin akan mendorong penerimaan dan pelaksanaan kebijakan dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi adanya Kredibilitas pimpinan yang kurang efektif di kedua sekolah tersebut karena kepala sekolah yang menjadi pimpinan di sekolah masing-masing memang mepercaakan program ini di sekolaah mereka terkait PIP ini namun dalam pelaksanaannya masih ada anak yang putus sekolah di SMAN 1 Lampihong karena kondisi eskonominya serta ada ketimpangan kouta untuk penerima PIP di MAN 3 Balangan yang hanya memprioritaskan kelas 11 dan 12 untuk PIP ini.

2. Faktor Pendorong

a. Sumber daya yang mencukupi

Ketersediaan sumber daya yang mencukupi kunci keberlangsungan dan keberhasilan suatu kebijakan untuk tercapainya tujuan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti kecukupan Sumber Daya terkait kebijakan PIP di SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 balangan dapat di simpulkan sudah baik dan cukup karena baik dari sumber daya manusianya atau operator yang menangani masalah PIP ini sudah cukup berpengalaman, begitupun dengan fasilitas

yang sudah memadai baik dari computer ataupun internet yang digunakan dalam pelaksanaannya.

b. Kebijakan yang berkelanjutan

Suatu kebijakan yang baik perlu dirancang secara berkelanjutan agar mampu mengatasi tantangan yang dinamis dan mampu memberikan manfaat yang stabil bagi masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 Balangan telah berjalan dengan baik. Meski kedua sekolah ini harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat, namun begitu pengumuman PIP ditetapkan untuk wilayah masing-masing, kedua institusi pendidikan tersebut segera mengimplementasikan program tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar di SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 Balangan, dapat disimpulkan bahwa program tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Hal dapat dilihat pada indikator yang belum baik yaitu: pertama pada sub variable isi pesan pada indikator kejelasan kebijakan karena dari pihak sekolah memang mengetahui akan aturan dari PIP ini, jalur atau tahapnya serta tujuan dari adanya Program Indonesia Pintar ini namun dari pihak orang tua siswa masih belum mengetahui akan kejelasan kebijakan tersebut. Karena kurangnya pemahaman tersebut sehingga tidak jarang dana PIP ini digunakan untuk belanja kebutuhan keluarga seperti kebutuhan pokok keluarga mereka. Kedua sub variable isi pesan pada indikator kredibilitas pesan sebagai solusi karena pihak sekolah memang menyampaikan pesan terkait program ini tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yaitu masih terdapat anak-anak yang kurang mampu namun tidak menerima bantuan program ini ada penerima PIP yang putus sekolah di SMAN 1 Lampihong serta hanya kelas 11 dan 12 di MAN 3 Balangan yang mendapat PIP ini. Artinya pesan yang di sampaikan belum menjadi solusi. Ketiga sub variable bentuk pesan pada indikator efisiensi masih belum efisien dalam pelaksanaannya karena masih adanya sasaran yang kurang tepat dan waktu pencairan yang lumayan lama serta tidak ada pendampingan oleh pihak sekolah dalam pengambilan uang PIP ini ke bank yang ada di kabupaten. Keempat pada sub variable bentuk pesan pada indikator partisipasi masyarakat karena pihak sekolah memang tidak pernah melakukan sosialisasi terkait PIP di sekolah mereka hanya ada rapat orang tua. Dari kurangnya partisipasi masyarakat ini juga menyebabkan orang tua penerima PIP ini tidak mengetahui tujuan dan manfaat adanya program ini sehingga dana yang diperuntukkan untuk pendidikan anak mereka bisa digunakan mereka untuk membeli kebutuhan lainnya diluar kebutuhan pendidikan. Kelima sub variable bentuk pesan pada indikator penerima kebijakan karena di kedua sekolah tersebut mempunyai sistem masing-masing sehingga menyebabkan ada 149 siswa yang masuk pengusulan dari SMAN 1 Lampihong sebanyak 95 siswa dan yang mendapat Program bantuan ini hanya 79 siswa artinya masih ada 16 siswa yang layak mendapatkan bantuan ini namun tidak mendapatkannya karena ada sistem penyaringan tersebut dan dari MAN 3 Balangan 54 siswa yang masuk dalam pengusulan tetapi yang mendapat bantuan ini hanya 42 siswa artinya masih ada 12 siswa yang layak untuk mendapat bantuan ini namun tidak mendapatkannya di karenakan ada tahap penyaringan tadi dan untuk MAN 3 Balangan ini yang mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar ini hanya kelas 11 dan 12 artinya kelas 10 belum bisa mendapatkan bantuan ini karena yang di prioritaskan hanya kelas 11 dan 12. Keenam sub variable persepsi tentang pimpinan pada indikator kredibilitas pimpinan karena kepala sekolah yang menjadi pimpinan di sekolah masing-masing memang mempercayakan program ini di sekolah

mereka terkait PIP ini namun dalam pelaksanaannya masih ada anak yang putus sekolah di SMAN 1 Lampihong karena kondisi ekonominya serta ada ketimpangan kouta untuk penerima PIP di MAN 3 Balangan yang hanya memprioritaskan kelas 11 dan 12 untuk PIP ini.

Adapun mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar di SMAN 1 Lampihong dan MAN 3 Balangan yaitu: faktor penghambat adalah yang *pertama* informasi yang tidak menyeluruh dari pihak sekolah memang mengetahui akan aturan dari PIP ini, jalur atau tahapnya serta tujuan dari adanya Program Indonesia Pintar ini namun dari pihak orang tua siswa masih belum mengetahui akan hal tersebut. Sehingga menyebabkan tidak jarang dana PIP ini digunakan untuk belanja kebutuhan keluarga. *Kedua* kesenjangan komunikasi sehingga menyebabkan kredibilitas pesan yang disampaikan belum menjadi solusi karena kenyataan di lapangan masih terdapat siswa yang kurang mampu namun tidak mendapat bantuan PIP ini. *Ketiga* kebijakan yang belum berjalan secara efektif masih belum bisa dikatakan efisien karena masih belum tepat sasaran, waktu pencairan yang lumayan lama serta tidak ada pendampingan dalam hal pengambilan uang PIP ini oleh sekolah. *Keempat* minimnya partisipasi karena pihak sekolah memang tidak pernah mengadakan atau melaksanakan sosialisasi khusus PIP ini, karena kurangnya partisipasi masyarakat ini juga menyebabkan orang tua penerima PIP ini tidak mengetahui tujuan dan manfaat adanya program ini sehingga dana yang diperuntukkan untuk pendidikan anak mereka bisa digunakan mereka untuk membeli kebutuhan lainnya diluar kebutuhan pendidikan. *Kelima* ketidaksesuaian penerima manfaat kebijakan masih terdapat siswa yang masuk kriteria kurang mampu dan masuk kriteria dalam prioritas penerima namun karena ada sistem penyaringan maka siswa tersebut ada beberapa orang yang tidak mendapatkan dana bantuan Program Indonesia Pintar ini. *Keenam* kredibilitas pimpinan yang kurang efektif, kepala sekolah yang menjadi pimpinan di sekolah masing-masing memang mepercayakan program ini di sekolah mereka terkait PIP ini namun dalam pelaksanaannya masih ada anak yang putus sekolah di SMAN 1 Lampihong karena kondisi ekonominya serta ada ketimpangan kouta untuk penerima PIP di MAN 3 Balangan yang hanya memprioritaskan kelas 11 dan 12 untuk PIP ini. Adapun faktor pendorong yang *pertama* Sumber daya yang mencukupi karena baik dari sumber daya manusianya atau operator yang menangani masalah PIP ini sudah cukup berpengalaman, begitupun dengan fasilitas yang sudah memadai baik dari komputer ataupun internet yang digunakan dalam pelaksanaannya. *kedua* kebijakan yang berkelanjutan pihak sekolah selalu melaksanakan program ini karena menyesuaikan dengan arahan pusat.

Saran kepada pemerintah untuk dapat memperkuat sistem pendataan dan verifikasi penerima PIP dan melakukan sosialisasi untuk orang tua penerima PIP, kepada pihak sekolah untuk dapat meningkatkan kualitas tata kelola PIP di sekolah, untuk Orang tua atau Masyarakat perlu berperan aktif mengetahui informasi PIP di sekolah dan memperhatikan penggunaan dananya untuk kebutuhan pendidikan anak. Untuk Siswa perlunya pemahaman mekanisme pelaksanaan PIP dan penggunaan dana untuk kebutuhan sekolah, Kepada tim verifikasi penentu penerima Program Indonesia Pintar ini agar melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait penentuan calon yang mendapatkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (2020) 'Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar'. Jakarta.

Firdianti, A. (2018) *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing.

- Hamdi, M. (2015) *Kebijakan Publik; Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kadji, Y. (2015) *FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam fakta Realitas)*. Gorontalo: UNG Press Grontalo.
- Karso, A.J. (2021) *Implementasi, Analis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Teeselenggara Kesejahteraan di Indonesia*. Cirebon: Insania Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati Anggota IKAPI.
- Riska, I.A. and Dewi Rostyaningsih (2018) 'Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Smp 3 Satu Atap Gebog Kudus', *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), pp. 608–631.
- Rohaeni, N.E. and Saryono, O. (2018) 'Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan', *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), pp. 193–204.
- Septiyani, A. (2020) *IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PADA JENJANG PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Sebelas April Sumedang.
- Sore, U.B. and Sobirin (2017) *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Subarsono (2012) *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ulfiah, U. (2020) *Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Kelua Kabupaten Tabalong*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ainah, N. *et al.* (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EEFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.
- Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal*

Riset Ilmiah, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) ‘KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN’, *Al’iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) ‘Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan’, *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) ‘Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin’, *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah’, *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) ‘EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) ‘Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) ‘Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) ‘IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI’YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) ‘EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) ‘Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur’, *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) ‘Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Hasbiyah, S. (2022) ‘IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU’, *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) ‘IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN

- DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) ‘Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Husaini, M. (2022) ‘Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) ‘IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) ‘Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control’, *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.
- Jumaidi, J. (2025) ‘PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.
- Junaidi, J. (2025) ‘INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) ‘Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) ‘PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) ‘Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)’, *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.
- Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) ‘Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI “GUSI”’, *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.
- Orbawati, O. (2025) ‘KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.
- Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) ‘PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN’, *Al’iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.
- Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) ‘Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.
- Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) ‘Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan’, *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.
- Saputra, T. *et al.* (2023) ‘Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.



- Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.
- Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jppa.20210503.16>.
- Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.
- Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.
- Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.